



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 29 TAHUN 2011

TENTANG

INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, perlu adanya standarisasi pembiayaan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-405 Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara persatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan Legislatif Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas di tentukan dalam Undang-Undang.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
9. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna Melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan Administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
10. Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam dan luar wilayah Kabupaten Kuantan Singingi untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.

11. Uang Harian adalah uang perjalanan dinas yang dibayarkan sekaligus yang terdiri dari uang makan, uang saku dan biaya transportasi lokal selama melaksanakan perjalanan Dinas.
12. Biaya Penginapan adalah uang perjalanan dinas yang dibayarkan untuk biaya penginapan selama melaksanakan perjalanan dinas.
13. Biaya Transportasi adalah uang perjalanan dinas yang digunakan untuk biaya angkutan udara, laut dan darat ke tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
14. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah tugas kepada Pejabat Negara/Pejabat/PNS/Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara/Pejabat/PNS/Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
18. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
19. Tempat bertolak adalah/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
20. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Pejabat Negara/Pejabat/PNS/Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
- (3) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan mengutamakan efektifitas dan efisiensi.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding bisa dilakukan dalam rangka.
 - a. adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah ;
 - b. untuk peningkatan pelayanan publik ;
 - c. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
 - d. menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan daerah.
- (5) Jumlah hari perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan riil

- (6) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pelatihan, workshop, rapat, seminar, lokakarya dapat diikuti apabila penyelenggara dari departemen terkait, instansi pemerintah atau lembaga non departemen yang bekerja sama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait.
- (7) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi ke departemen atau instansi pemerintah terkait dilakukan secara selektif dan dibatasi :
 - a. dilengkapi dengan laporan hasil konsultasi/koordinasi dimaksud;
 - b. jumlah hari pelaksanaan dibatasi selama 3(tiga) hari kerja untuk dalam Provinsi Riau dan 4 (empat) hari untuk ke Luar Provinsi Riau;
 - c. hanya terbatas pada kegiatan yang berkaitan langsung dengan Departemen terkait ;

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya.
 2. Dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya ;
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
 - a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya;
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS, PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

Biaya perjalanan dinas terdiri dari :

- a. uang harian
- b. biaya penginapan
- c. biaya transportasi.
- d. biaya taksi

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD yang Bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.
- (3) Standarisasi perjalanan dinas dalam negeri PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III dan IV peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 6

Pejabat Negara/Pejabat/PNS/Non PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan, dengan menggunakan uang muka perjalanan dinas
- (2) Format Uang Muka (panjar) perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang Harian Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dibayarkan secara lumpsum sesuai lamanya perjalanan dinas.
- (4) Uang Penginapan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dibayarkan secara lumpsum
- (5) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas
- (6) Dalam hal harga tiket pesawat yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara/Pejabat/PNS serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetor kembali kelebihan biaya tiket yang diterimanya.
- (7) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dibayarkan secara lumpsum untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan diluar Provinsi Riau.
- (8) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

(9) Perjalanan Dinas bagi Non PNS disetarakan dengan:

- a. PNS Golongan II bagi tamatan Sarjana Muda, Strata I dan Strata II
- b. PNS Golongan I bagi tamatan SD, SLTP dan SLTA

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 8

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD.

Pasal 9

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 10

- (1) Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan perjalanan dan dokumen pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tertulis kepada atasan langsung secara hirarki sesuai dengan tingkat jabatan dan permasalahan serta menyampaikan tembusan kepada Bagian Tata Usaha SKPD bersangkutan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari visum SPPD, laporan perjalanan dinas, tiket dan boarding pass serta airport tax.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas, kecuali untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hal hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Hukum administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

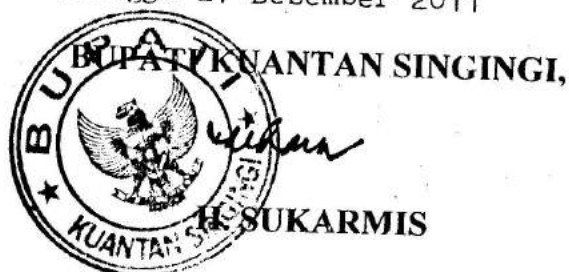
Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor: 3 Tahun 2011 Tentang Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 27 Desember 2011



Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 27 Desember 2011

KABUPATEN DAERAH KABUPATEN Kuantan Singingi,



Drs. H. MUHARMAN, M.Pd

Ketua Muda

NIP. 19570901 197701 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN Kuantan Singingi TAHUN 2011 NOMOR 29

Lampiran I : Peraturan Bupati Kuantan Singingi

Nomor : 29 Tahun 2011

Tanggal : 27 Desember 2011

**FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

No.	Uraian	Transportasi	
		Udara	Darat
1	Bupati/Wakil Bupati	Bisnis	Super Eksekutif
2	Ketua/Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Super Eksekutif
3	Pejabat Eselon II.a	Bisnis	Super Eksekutif
4	Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD	Ekonomi	Eksekutif
5	Pejabat Eselon III/Gol IV	Ekonomi	Eksekutif
6	Pejabat Eselon IV/Gol III	Ekonomi	Eksekutif
7	Staf Golongan I dan II	Ekonomi	Eksekutif



Lampiran II: Peraturan Bupati Kuantan Singingi

Nomor : 29 Tahun 2011

Tanggal : 27 Desember 2011

**SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

No	Tujuan	Esselon / Golongan	Biaya Penginapan per Hari (Rp)
1	2	3	4
A.	Dalam Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	350,000
		Esselon II.a	335,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	325,000
		Esselon III gol IV	310,000
		Esselon III gol III	300,000
		Esselon IV gol IV	280,000
		Esselon IV gol III	270,000
		PNS Non Struktural Gol IV	255,000
		PNS Non Struktural Gol III	250,000
		PNS Non Struktural Gol II	220,000
PNS Non Struktural Gol I	200,000		
B.	Di dalam Wilayah Provinsi Riau 1. Ke Pekanbaru	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	450,000
		Esselon II.a	380,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	370,000
		Esselon III gol IV	360,000
		Esselon III gol III	350,000
		Esselon IV gol IV	340,000
		Esselon IV gol III	330,000
		PNS Non Struktural Gol IV	320,000
		PNS Non Struktural Gol III	300,000
		PNS Non Struktural Gol II	260,000
	PNS Non Struktural Gol I	250,000	
	2. Ke Kab. Indragiri Hulu	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	450,000
		Esselon II.a	380,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	370,000
		Esselon III gol IV	360,000
		Esselon III gol III	350,000
		Esselon IV gol IV	340,000
		Esselon IV gol III	330,000
		PNS Non Struktural Gol IV	320,000
		PNS Non Struktural Gol III	300,000
PNS Non Struktural Gol II		260,000	
PNS Non Struktural Gol I	250,000		

2. 860.000
2. 590.000
2. 460.000
2. 380.000
2. 300.000
2. 220.000
2. 140.000
2. 090.000
2. 000.000
1.780.000,
1.700.000,

1	2	3	4	
3. Ke Kab. Indragiri Hilir	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD		450,000	
	Esselon II.a		380,000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b		370,000	
	Esselon III gol IV		360,000	
	Esselon III gol III		350,000	
	Esselon IV gol IV		340,000	
	Esselon IV gol III		330,000	
	PNS Non Struktural Gol IV		320,000	
	PNS Non Struktural Gol III		300,000	
	PNS Non Struktural Gol II		260,000	
	PNS Non Struktural Gol I		250,000	
	4. Ke Kab. Bengkalis	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD		450,000
		Esselon II.a		380,000
Anggota DPRD/Ess. II.b			370,000	
Esselon III gol IV			360,000	
Esselon III gol III			350,000	
Esselon IV gol IV			340,000	
Esselon IV gol III			330,000	
PNS Non Struktural Gol IV			320,000	
PNS Non Struktural Gol III			300,000	
PNS Non Struktural Gol II			260,000	
PNS Non Struktural Gol I			250,000	
5. Ke Kab. Kampar		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD		450,000
		Esselon II.a		380,000
	Anggota DPRD/Ess. II.b		370,000	
	Esselon III gol IV		360,000	
	Esselon III gol III		350,000	
	Esselon IV gol IV		340,000	
	Esselon IV gol III		330,000	
	PNS Non Struktural Gol IV		320,000	
	PNS Non Struktural Gol III		300,000	
	PNS Non Struktural Gol II		260,000	
	PNS Non Struktural Gol I		250,000	
	6. Ke Kab Dumai	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD		450,000
		Esselon II.a		380,000
Anggota DPRD/Ess. II.b			370,000	
Esselon III gol IV			360,000	
Esselon III gol III			350,000	
Esselon IV gol IV			340,000	
Esselon IV gol III			330,000	
PNS Non Struktural Gol IV			320,000	
PNS Non Struktural Gol III			300,000	
PNS Non Struktural Gol II			260,000	
PNS Non Struktural Gol I			250,000	

1	2	3	4
	7. Ke Kab. Rokan Hulu	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	450,000
		Esselon II.a	380,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	370,000
		Esselon III gol IV	360,000
		Esselon III gol III	350,000
		Esselon IV gol IV	340,000
		Esselon IV gol III	330,000
		PNS Non Struktural Gol IV	320,000
		PNS Non Struktural Gol III	300,000
		PNS Non Struktural Gol II	260,000
		PNS Non Struktural Gol I	250,000
	8. Ke Kab. Rokan Hilir	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	450,000
		Esselon II.a	380,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	370,000
		Esselon III gol IV	360,000
		Esselon III gol III	350,000
		Esselon IV gol IV	340,000
		Esselon IV gol III	330,000
		PNS Non Struktural Gol IV	320,000
		PNS Non Struktural Gol III	300,000
		PNS Non Struktural Gol II	260,000
		PNS Non Struktural Gol I	250,000
	9. Ke Kab. Siak	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	450,000
		Esselon II.a	380,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	370,000
		Esselon III gol IV	360,000
		Esselon III gol III	350,000
		Esselon IV gol IV	340,000
		Esselon IV gol III	330,000
		PNS Non Struktural Gol IV	320,000
		PNS Non Struktural Gol III	300,000
		PNS Non Struktural Gol II	260,000
		PNS Non Struktural Gol I	250,000
	10. Ke Kab. Pelalawan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	450,000
		Esselon II.a	380,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	370,000
		Esselon III gol IV	360,000
		Esselon III gol III	350,000
		Esselon IV gol IV	340,000
		Esselon IV gol III	330,000
		PNS Non Struktural Gol IV	320,000
		PNS Non Struktural Gol III	300,000
		PNS Non Struktural Gol II	260,000
		PNS Non Struktural Gol I	250,000

1	2	3	4
	11. Ke Kab. Kepulauan Meranti	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Esselon III gol IV Esselon III gol III Esselon IV gol IV Esselon IV gol III PNS Non Struktural Gol IV PNS Non Struktural Gol III PNS Non Struktural Gol II PNS Non Struktural Gol I	450,000 380,000 370,000 360,000 350,000 340,000 330,000 320,000 300,000 260,000 250,000
C.	Di luar Wilayah Provinsi Riau 1. Kota Batam 2. Tanjung Pinang 3. Kab. Natuna	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Esselon III gol IV Esselon III gol III Esselon IV gol IV Esselon IV gol II PNS Non Struktural Gol IV PNS Non Struktural Gol III PNS Non Struktural Gol II PNS Non Struktural Gol I Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Esselon III gol IV Esselon III gol III Esselon IV gol IV Esselon IV gol III PNS Non Struktural Gol IV PNS Non Struktural Gol III PNS Non Struktural Gol II PNS Non Struktural Gol I Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Esselon III gol IV Esselon III gol III Esselon IV gol IV Esselon IV gol III PNS Non Struktural Gol IV PNS Non Struktural Gol III PNS Non Struktural Gol II PNS Non Struktural Gol I	1,200,000 800,000 750,000 665,000 660,000 650,000 645,000 635,000 510,000 350,000 335,000 1,200,000 800,000 750,000 665,000 660,000 650,000 645,000 635,000 510,000 350,000 335,000 1,200,000 800,000 750,000 665,000 660,000 650,000 645,000 635,000 510,000 350,000 335,000

1	2	3	4		
4. Aceh		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,200,000		
		Esselon II.a	800,000		
		Anggota DPRD/Ess. II.b	750,000		
		Esselon III gol IV	665,000		
		Esselon III gol III	660,000		
		Esselon IV gol IV	650,000		
		Esselon IV gol III	645,000		
		PNS Non Struktural Gol IV	635,000		
		PNS Non Struktural Gol III	510,000		
		PNS Non Struktural Gol II	350,000		
		PNS Non Struktural Gol I	335,000		
		5. Sumatera Utara		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,200,000
				Esselon II.a	800,000
Anggota DPRD/Ess. II.b	750,000				
Esselon III gol IV	665,000				
Esselon III gol III	660,000				
Esselon IV gol IV	650,000				
Esselon IV gol III	645,000				
PNS Non Struktural Gol IV	635,000				
PNS Non Struktural Gol III	510,000				
PNS Non Struktural Gol II	350,000				
PNS Non Struktural Gol I	335,000				
6. Sumatera Barat				Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,200,000
				Esselon II.a	800,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	750,000		
		Esselon III gol IV	665,000		
		Esselon III gol III	660,000		
		Esselon IV gol IV	650,000		
		Esselon IV gol III	645,000		
		PNS Non Struktural Gol IV	635,000		
		PNS Non Struktural Gol III	510,000		
		PNS Non Struktural Gol II	350,000		
		PNS Non Struktural Gol I	335,000		
		7. Jambi		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,200,000
				Esselon II.a	800,000
Anggota DPRD/Ess. II.b	750,000				
Esselon III gol IV	665,000				
Esselon III gol III	660,000				
Esselon IV gol IV	650,000				
Esselon IV gol III	645,000				
PNS Non Struktural Gol IV	635,000				
PNS Non Struktural Gol III	510,000				
PNS Non Struktural Gol II	350,000				
PNS Non Struktural Gol I	335,000				

1	2	3	4
	8. Bengkulu	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Esselon III gol IV Esselon III gol III Esselon IV gol IV Esselon IV gol III PNS Non Struktural Gol IV PNS Non Struktural Gol III PNS Non Struktural Gol II PNS Non Struktural Gol I	1,200,000 800,000 750,000 665,000 660,000 650,000 645,000 635,000 510,000 350,000 335,000
	9. Sumatera Selatan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Esselon III gol IV Esselon III gol III Esselon IV gol IV Esselon IV gol III PNS Non Struktural Gol IV PNS Non Struktural Gol III PNS Non Struktural Gol II PNS Non Struktural Gol I	1,200,000 800,000 750,000 665,000 660,000 650,000 645,000 635,000 510,000 350,000 335,000
	10. Lampung	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Esselon III gol IV Esselon III gol III Esselon IV gol IV Esselon IV gol III PNS Non Struktural Gol IV PNS Non Struktural Gol III PNS Non Struktural Gol II PNS Non Struktural Gol I	1,200,000 800,000 750,000 665,000 660,000 650,000 645,000 635,000 510,000 350,000 335,000
	11. Jakarta	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esselon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Esselon III gol IV Esselon III gol III Esselon IV gol IV Esselon IV gol III PNS Non Struktural Gol IV PNS Non Struktural Gol III PNS Non Struktural Gol II PNS Non Struktural Gol I	1,200,000 800,000 750,000 665,000 660,000 650,000 645,000 635,000 510,000 350,000 335,000

1	2	3	4
	12. Jawa Barat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,200,000
		Esselon II.a	800,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	750,000
		Esselon III gol IV	665,000
		Esselon III gol III	660,000
		Esselon IV gol IV	650,000
		Esselon IV gol III	645,000
		PNS Non Struktural Gol IV	635,000
		PNS Non Struktural Gol III	510,000
		PNS Non Struktural Gol II	350,000
		PNS Non Struktural Gol I	335,000
	13. Jawa Tengah	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,200,000
		Esselon II.a	800,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	750,000
		Esselon III gol IV	665,000
		Esselon III gol III	660,000
		Esselon IV gol IV	650,000
		Esselon IV gol III	645,000
		PNS Non Struktural Gol IV	635,000
		PNS Non Struktural Gol III	510,000
		PNS Non Struktural Gol II	350,000
		PNS Non Struktural Gol I	335,000
	14. Yogyakarta	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,200,000
		Esselon II.a	800,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	750,000
		Esselon III gol IV	665,000
		Esselon III gol III	660,000
		Esselon IV gol IV	650,000
		Esselon IV gol III	645,000
		PNS Non Struktural Gol IV	635,000
		PNS Non Struktural Gol III	510,000
		PNS Non Struktural Gol II	350,000
		PNS Non Struktural Gol I	335,000
	15. Jawa Timur	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,200,000
		Esselon II.a	800,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	750,000
		Esselon III gol IV	665,000
		Esselon III gol III	660,000
		Esselon IV gol IV	650,000
		Esselon IV gol III	645,000
		PNS Non Struktural Gol IV	635,000
		PNS Non Struktural Gol III	510,000
		PNS Non Struktural Gol II	350,000
		PNS Non Struktural Gol I	335,000

1	2	3	4
16. Bali	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,200,000	
	Eselon II.a	800,000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	750,000	
	Eselon III gol IV	665,000	
	Eselon III gol III	660,000	
	Eselon IV gol IV	650,000	
	Eselon IV gol III	645,000	
	PNS Non Struktural Gol IV	635,000	
	PNS Non Struktural Gol III	510,000	
	PNS Non Struktural Gol II	350,000	
	PNS Non Struktural Gol I	335,000	
17. Nusa Tenggara Barat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,200,000	
	Eselon II.a	800,000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	750,000	
	Eselon III gol IV	665,000	
	Eselon III gol III	660,000	
	Eselon IV gol IV	650,000	
	Eselon IV gol III	645,000	
	PNS Non Struktural Gol IV	635,000	
	PNS Non Struktural Gol II	510,000	
	PNS Non Struktural Gol II	350,000	
	PNS Non Struktural Gol I	335,000	
18. Nusa Tenggara Timur	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,200,000	
	Eselon II.a	800,000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	750,000	
	Eselon III gol IV	665,000	
	Eselon III gol III	660,000	
	Eselon IV gol IV	650,000	
	Eselon IV gol III	645,000	
	PNS Non Struktural Gol IV	635,000	
	PNS Non Struktural Gol III	510,000	
	PNS Non Struktural Gol II	350,000	
	PNS Non Struktural Gol I	335,000	
19. Kalimantan Barat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,200,000	
	Eselon II.a	800,000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	750,000	
	Eselon III gol IV	665,000	
	Eselon III gol III	660,000	
	Eselon IV gol IV	650,000	
	Eselon IV gol III	645,000	
	PNS Non Struktural Gol IV	635,000	
	PNS Non Struktural Gol III	510,000	
	PNS Non Struktural Gol II	350,000	
	PNS Non Struktural Gol I	335,000	

1	2	3	4
20. Kalimantan Tengah	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD		1,200,000
	Esselon II.a		800,000
	Anggota DPRD/Ess. II.b		750,000
	Esselon III gol IV		665,000
	Esselon III gol III		660,000
	Esselon IV gol IV		650,000
	Esselon IV gol III		645,000
	PNS Non Struktural Gol IV		635,000
	PNS Non Struktural Gol III		510,000
	PNS Non Struktural Gol II		350,000
	PNS Non Struktural Gol I		335,000
	21. Kalimantan Timur	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	
Esselon II.a			800,000
Anggota DPRD/Ess. II.b			750,000
Esselon III gol IV			665,000
Esselon III gol III			660,000
Esselon IV gol IV			650,000
Esselon IV gol III			645,000
PNS Non Struktural Gol IV			635,000
PNS Non Struktural Gol III			510,000
PNS Non Struktural Gol II			350,000
PNS Non Struktural Gol I			335,000
22. Kalimantan Selatan		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	
	Esselon II.a		800,000
	Anggota DPRD/Ess. II.b		750,000
	Esselon III gol IV		665,000
	Esselon III gol III		660,000
	Esselon IV gol IV		650,000
	Esselon IV gol III		645,000
	PNS Non Struktural Gol IV		635,000
	PNS Non Struktural Gol III		510,000
	PNS Non Struktural Gol II		350,000
	PNS Non Struktural Gol I		335,000
	23. Sulawesi Selatan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	
Esselon II.a			800,000
Anggota DPRD/Ess. II.b			750,000
Esselon III gol IV			665,000
Esselon III gol III			660,000
Esselon IV gol IV			650,000
Esselon IV gol III			645,000
PNS Non Struktural Gol IV			635,000
PNS Non Struktural Gol III			510,000
PNS Non Struktural Gol II			350,000
PNS Non Struktural Gol I			335,000

1	2	3	4
	24. Sulawesi Utara	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esseelon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Esseelon III gol IV Esseelon III gol III Esseelon IV gol IV Esseelon IV gol III PNS Non Struktural Gol IV PNS Non Struktural Gol III PNS Non Struktural Gol II PNS Non Struktural Gol I	1,200,000 800,000 750,000 665,000 660,000 650,000 645,000 635,000 510,000 350,000 335,000
	25. Sulawesi Tenggara	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esseelon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Esseelon III gol IV Esseelon III gol III Esseelon IV gol IV Esseelon IV gol III PNS Non Struktural Gol IV PNS Non Struktural Gol III PNS Non Struktural Gol II PNS Non Struktural Gol I	1,200,000 800,000 750,000 665,000 660,000 650,000 645,000 635,000 510,000 350,000 335,000
	26. Sulawesi Tengah	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esseelon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Esseelon III gol IV Esseelon III gol III Esseelon IV gol IV Esseelon IV gol III PNS Non Struktural Gol IV PNS Non Struktural Gol III PNS Non Struktural Gol II PNS Non Struktural Gol I	1,200,000 800,000 750,000 665,000 660,000 650,000 645,000 635,000 510,000 350,000 335,000
	27. Gorontalo	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD Esseelon II.a Anggota DPRD/Ess. II.b Esseelon III gol IV Esseelon III gol III Esseelon IV gol IV Esseelon IV gol III PNS Non Struktural Gol IV PNS Non Struktural Gol III PNS Non Struktural Gol II PNS Non Struktural Gol I	1,200,000 800,000 750,000 665,000 660,000 650,000 645,000 635,000 510,000 350,000 335,000

1	2	3	4
28. Sulawesi Barat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,200,000	
	Eselon II.a	800,000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	750,000	
	Eselon III gol IV	665,000	
	Eselon III gol III	660,000	
	Eselon IV gol IV	650,000	
	Eselon IV gol III	645,000	
	PNS Non Struktural Gol IV	635,000	
	PNS Non Struktural Gol III	510,000	
	PNS Non Struktural Gol II	350,000	
	PNS Non Struktural Gol I	335,000	
	29. Pangkal Pinang	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,200,000
		Eselon II.a	800,000
Anggota DPRD/Ess. II.b		750,000	
Eselon III gol IV		665,000	
Eselon III gol III		660,000	
Eselon IV gol IV		650,000	
Eselon IV gol III		645,000	
PNS Non Struktural Gol IV		635,000	
PNS Non Struktural Gol III		510,000	
PNS Non Struktural Gol II		350,000	
PNS Non Struktural Gol I		335,000	
30. Ambon		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,200,000
		Eselon II.a	800,000
	Anggota DPRD/Ess. II.b	750,000	
	Eselon III gol IV	665,000	
	Eselon III gol III	660,000	
	Eselon IV gol IV	650,000	
	Eselon IV gol III	645,000	
	PNS Non Struktural Gol IV	635,000	
	PNS Non Struktural Gol III	510,000	
	PNS Non Struktural Gol II	350,000	
	PNS Non Struktural Gol I	335,000	
	31. Ternate	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,200,000
		Eselon II.a	800,000
Anggota DPRD/Ess. II.b		750,000	
Eselon III gol IV		665,000	
Eselon III gol III		660,000	
Eselon IV gol IV		650,000	
Eselon IV gol III		645,000	
PNS Non Struktural Gol IV		635,000	
PNS Non Struktural Gol III		510,000	
PNS Non Struktural Gol II		350,000	
PNS Non Struktural Gol I		335,000	

1	2	3	4		
32. Biak		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,200,000		
		Esselon II.a	800,000		
		Anggota DPRD/Ess. II.b	750,000		
		Esselon III gol IV	665,000		
		Esselon III gol III	660,000		
		Esselon IV gol IV	650,000		
		Esselon IV gol III	645,000		
		PNS Non Struktural Gol IV	635,000		
		PNS Non Struktural Gol III	510,000		
		PNS Non Struktural Gol II	350,000		
		PNS Non Struktural Gol I	335,000		
		33. Jayapura		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,200,000
				Esselon II.a	800,000
				Anggota DPRD/Ess. II.b	750,000
Esselon III gol IV	665,000				
Esselon III gol III	660,000				
Esselon IV gol IV	650,000				
Esselon IV gol III	645,000				
PNS Non Struktural Gol IV	635,000				
PNS Non Struktural Gol III	510,000				
PNS Non Struktural Gol II	350,000				
PNS Non Struktural Gol I	335,000				



Lampiran IV: Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 29 Tahun 2021
 Tanggal : 27 Desember 2011

**SATUAN UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

No	Tujuan	Esselon / Golongan	Biaya Penginapan per Hari (Rp)	
1	2	3	4	
A.	Dalam Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	0	
		Esselon II.a	0	
		Anggota DPRD/Ess. II.b	0	
		Esselon III gol IV	0	
		Esselon III gol III	0	
		Esselon IV gol IV	0	
		Esselon IV gol III	0	
		PNS Non Struktural Gol IV	0	
		PNS Non Struktural Gol III	0	
		PNS Non Struktural Gol II	0	
		PNS Non Struktural Gol I	0	
B.	Di Dalam Wilayah Provinsi Riau			
		1. Ke Pekanbaru	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	680,000
			Esselon II.a	650,000
			Anggota DPRD/Ess. II.b	600,000
			Esselon III gol IV	575,000
			Esselon III gol III	550,000
			Esselon IV gol IV	525,000
			Esselon IV gol III	500,000
			PNS Non Struktural Gol IV	480,000
			PNS Non Struktural Gol III	475,000
			PNS Non Struktural Gol II	425,000
			PNS Non Struktural Gol I	400,000
			2. Ke Kab. Indragiri Hulu	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD
	Esselon II.a			650,000
	Anggota DPRD/Ess. II.b	600,000		
	Esselon III gol IV	575,000		
	Esselon III gol III	550,000		
	Esselon IV gol IV	525,000		
	Esselon IV gol III	500,000		
	PNS Non Struktural Gol IV	480,000		
	PNS Non Struktural Gol III	475,000		
	PNS Non Struktural Gol II	425,000		
	PNS Non Struktural Gol I	400,000		
	3. Ke Kab. Indragiri Hilir	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD		680,000
		Esselon II.a		650,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	600,000	
		Esselon III gol IV	575,000	
		Esselon III gol III	550,000	
		Esselon IV gol IV	525,000	
		Esselon IV gol III	500,000	
		PNS Non Struktural Gol IV	480,000	
		PNS Non Struktural Gol III	475,000	
		PNS Non Struktural Gol II	425,000	
		PNS Non Struktural Gol I	400,000	
		4. Ke Kab. Bengkalis	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	680,000
			Esselon II.a	650,000
	Anggota DPRD/Ess. II.b		600,000	
	Esselon III gol IV		575,000	
	Esselon III gol III		550,000	
	Esselon IV gol IV		525,000	
	Esselon IV gol III		500,000	
PNS Non Struktural Gol IV	480,000			
PNS Non Struktural Gol III	475,000			
PNS Non Struktural Gol II	425,000			
PNS Non Struktural Gol I	400,000			

1	2	3	4	
5. Ke Kab. Kampar	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD		680,000	
	Eselon II.a		650,000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b		600,000	
	Eselon III gol IV		575,000	
	Eselon III gol III		550,000	
	Eselon IV gol IV		525,000	
	Eselon IV gol III		500,000	
	PNS Non Struktural Gol IV		480,000	
	PNS Non Struktural Gol III		475,000	
	PNS Non Struktural Gol II		425,000	
	PNS Non Struktural Gol I		400,000	
	6. Ke Kab Dumai	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD		680,000
		Eselon II.a		650,000
Anggota DPRD/Ess. II.b			600,000	
Eselon III gol IV			575,000	
Eselon III gol III			550,000	
Eselon IV gol IV			525,000	
Eselon IV gol III			500,000	
PNS Non Struktural Gol IV			480,000	
PNS Non Struktural Gol III			475,000	
PNS Non Struktural Gol II			425,000	
PNS Non Struktural Gol I			400,000	
7. Ke Kab. Rokan Hulu		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD		680,000
		Eselon II.a		650,000
	Anggota DPRD/Ess. II.b		600,000	
	Eselon III gol IV		575,000	
	Eselon III gol III		550,000	
	Eselon IV gol IV		525,000	
	Eselon IV gol III		500,000	
	PNS Non Struktural Gol IV		480,000	
	PNS Non Struktural Gol III		475,000	
	PNS Non Struktural Gol II		425,000	
	PNS Non Struktural Gol I		400,000	
	8. Ke Kab. Rokan Hilir	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD		680,000
		Eselon II.a		650,000
Anggota DPRD/Ess. II.b			600,000	
Eselon III gol IV			575,000	
Eselon III gol III			550,000	
Eselon IV gol IV			525,000	
Eselon IV gol III			500,000	
PNS Non Struktural Gol IV			480,000	
PNS Non Struktural Gol III			475,000	
PNS Non Struktural Gol II			425,000	
PNS Non Struktural Gol I			400,000	
9. Ke Kab. Siak		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD		680,000
		Eselon II.a		650,000
	Anggota DPRD/Ess. II.b		600,000	
	Eselon III gol IV		575,000	
	Eselon III gol III		550,000	
	Eselon IV gol IV		525,000	
	Eselon IV gol III		500,000	
	PNS Non Struktural Gol-IV		480,000	
	PNS Non Struktural Gol III		475,000	
	PNS Non Struktural Gol II		425,000	
PNS Non Struktural Gol I		400,000		

1	2	3	4
	10. Ke Kab. Pelalawan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	680,000
		Esselon II.a	650,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	600,000
		Esselon III gol IV	575,000
		Esselon III gol III	550,000
		Esselon IV gol IV	525,000
		Esselon IV gol III	500,000
		PNS Non Struktural Gol IV	480,000
		PNS Non Struktural Gol III	475,000
		PNS Non Struktural Gol II	425,000
	PNS Non Struktural Gol I	400,000	
	11. Ke Kab. Kepulauan Meranti	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	680,000
		Esselon II.a	650,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	600,000
		Esselon III gol IV	575,000
		Esselon III gol III	550,000
		Esselon IV gol IV	525,000
		Esselon IV gol III	500,000
		PNS Non Struktural Gol IV	480,000
		PNS Non Struktural Gol III	475,000
PNS Non Struktural Gol II		425,000	
PNS Non Struktural Gol I	400,000		
C.	Di luar Wilayah Provinsi Riau		
1. Kota Batam	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000	
	Esselon II.a	975,000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000	
	Esselon III gol IV	750,000	
	Esselon III gol III	650,000	
	Esselon IV gol IV	600,000	
	Esselon IV gol III	590,000	
	PNS Non Struktural Gol IV	560,000	
	PNS Non Struktural Gol III	550,000	
	PNS Non Struktural Gol II	460,000	
	PNS Non Struktural Gol I	450,000	
	2. Tanjung Pinang	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
		Esselon II.a	975,000
Anggota DPRD/Ess. II.b		950,000	
Esselon III gol IV		750,000	
Esselon III gol III		650,000	
Esselon IV gol IV		600,000	
Esselon IV gol III		590,000	
PNS Non Struktural Gol IV		560,000	
PNS Non Struktural Gol III		550,000	
PNS Non Struktural Gol II		460,000	
PNS Non Struktural Gol I	450,000		
3. Kab. Natuna	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,100,000	
	Esselon II.a	975,000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000	
	Esselon III gol IV	750,000	
	Esselon III gol III	650,000	
	Esselon IV gol IV	600,000	
	Esselon IV gol III	590,000	
	PNS Non Struktural Gol IV	560,000	
	PNS Non Struktural Gol III	550,000	
	PNS Non Struktural Gol II	460,000	
PNS Non Struktural Gol I	450,000		

1	2	3	4
14. Yogyakarta		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
		Eselon II.a	975,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
		Eselon III gol IV	750,000
		Eselon III gol III	650,000
		Eselon IV gol IV	600,000
		Eselon IV gol III	590,000
		PNS Non Struktural Gol IV	560,000
		PNS Non Struktural Gol III	550,000
		PNS Non Struktural Gol II	460,000
PNS Non Struktural Gol I	450,000		
15. Jawa Timur		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
		Eselon II.a	975,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
		Eselon III gol IV	750,000
		Eselon III gol III	650,000
		Eselon IV gol IV	600,000
		Eselon IV gol III	590,000
		PNS Non Struktural Gol IV	560,000
		PNS Non Struktural Gol III	550,000
		PNS Non Struktural Gol II	460,000
PNS Non Struktural Gol I	450,000		
16. Bali		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
		Eselon II.a	975,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
		Eselon III gol IV	750,000
		Eselon III gol III	650,000
		Eselon IV gol IV	600,000
		Eselon IV gol III	590,000
		PNS Non Struktural Gol IV	560,000
		PNS Non Struktural Gol III	550,000
		PNS Non Struktural Gol II	460,000
PNS Non Struktural Gol I	450,000		
17. Nusa Tenggara Barat		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
		Eselon II.a	975,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
		Eselon III gol IV	750,000
		Eselon III gol III	650,000
		Eselon IV gol IV	600,000
		Eselon IV gol III	590,000
		PNS Non Struktural Gol IV	560,000
		PNS Non Struktural Gol III	550,000
		PNS Non Struktural Gol II	460,000
PNS Non Struktural Gol I	450,000		
18. Nusa Tenggara Timur		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
		Eselon II.a	975,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
		Eselon III gol IV	750,000
		Eselon III gol III	650,000
		Eselon IV gol IV	600,000
		Eselon IV gol III	590,000
		PNS Non Struktural Gol IV	560,000
		PNS Non Struktural Gol III	550,000
		PNS Non Struktural Gol II	460,000

1	2	3	4		
4. Aceh		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000		
		Eselon II.a	975,000		
		Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000		
		Eselon III gol IV	750,000		
		Eselon III gol III	650,000		
		Eselon IV gol IV	600,000		
		Eselon IV gol III	590,000		
		PNS Non Struktural Gol IV	560,000		
		PNS Non Struktural Gol III	550,000		
		PNS Non Struktural Gol II	460,000		
		PNS Non Struktural Gol I	450,000		
		5. Sumatera Utara		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
				Eselon II.a	975,000
				Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
Eselon III gol IV	750,000				
Eselon III gol III	650,000				
Eselon IV gol IV	600,000				
Eselon IV gol III	590,000				
PNS Non Struktural Gol IV	560,000				
PNS Non Struktural Gol III	550,000				
PNS Non Struktural Gol II	460,000				
PNS Non Struktural Gol I	450,000				
6. Sumatera Barat				Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
				Eselon II.a	975,000
				Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
		Eselon III gol IV	750,000		
		Eselon III gol III	650,000		
		Eselon IV gol IV	600,000		
		Eselon IV gol III	590,000		
		PNS Non Struktural Gol IV	560,000		
		PNS Non Struktural Gol III	550,000		
		PNS Non Struktural Gol II	460,000		
		PNS Non Struktural Gol I	450,000		
		7. Jambi		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
				Eselon II.a	975,000
				Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
Eselon III gol IV	750,000				
Eselon III gol III	650,000				
Eselon IV gol IV	600,000				
Eselon IV gol III	590,000				
PNS Non Struktural Gol IV	560,000				
PNS Non Struktural Gol III	550,000				
PNS Non Struktural Gol II	460,000				
PNS Non Struktural Gol I	450,000				
8. Bengkulu				Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
				Eselon II.a	975,000
				Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
		Eselon III gol IV	750,000		
		Eselon III gol III	650,000		
		Eselon IV gol IV	600,000		
		Eselon IV gol III	590,000		
		PNS Non Struktural Gol-IV	560,000		
		PNS Non Struktural Gol III	550,000		
		PNS Non Struktural Gol II	460,000		
		PNS Non Struktural Gol I	450,000		

1	2	3	4
9. Sumatera Selatan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000	
	Eselon II.a	975,000	
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000	
	Eselon III gol IV	750,000	
	Eselon III gol III	650,000	
	Eselon IV gol IV	600,000	
	Eselon IV gol III	590,000	
	PNS Non Struktural Gol IV	560,000	
	PNS Non Struktural Gol III	550,000	
	PNS Non Struktural Gol II	460,000	
	PNS Non Struktural Gol I	450,000	
	10. Lampung	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
		Eselon II.a	975,000
Anggota DPRD/Ess. II.b		950,000	
Eselon III gol IV		750,000	
Eselon III gol III		650,000	
Eselon IV gol IV		600,000	
Eselon IV gol III		590,000	
PNS Non Struktural Gol IV		560,000	
PNS Non Struktural Gol III		550,000	
PNS Non Struktural Gol II		460,000	
PNS Non Struktural Gol I		450,000	
11. Jakarta		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
		Eselon II.a	975,000
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000	
	Eselon III gol IV	750,000	
	Eselon III gol III	650,000	
	Eselon IV gol IV	600,000	
	Eselon IV gol III	590,000	
	PNS Non Struktural Gol IV	560,000	
	PNS Non Struktural Gol III	550,000	
	PNS Non Struktural Gol II	460,000	
	PNS Non Struktural Gol I	450,000	
	12. Jawa Barat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
		Eselon II.a	975,000
Anggota DPRD/Ess. II.b		950,000	
Eselon III gol IV		750,000	
Eselon III gol III		650,000	
Eselon IV gol IV		600,000	
Eselon IV gol III		590,000	
PNS Non Struktural Gol IV		560,000	
PNS Non Struktural Gol III		550,000	
PNS Non Struktural Gol II		460,000	
PNS Non Struktural Gol I		450,000	
13. Jawa Tengah		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
		Eselon II.a	975,000
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000	
	Eselon III gol IV	750,000	
	Eselon III gol III	650,000	
	Eselon IV gol IV	600,000	
	Eselon IV gol III	590,000	
	PNS Non Struktural Gol IV	560,000	
	PNS Non Struktural Gol III	550,000	
	PNS Non Struktural Gol II	460,000	
	PNS Non Struktural Gol I	450,000	

1	2	3	4
	19. Kalimantan Barat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
		Esselelon II.a	975,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
		Esselelon III gol IV	750,000
		Esselelon III gol III	650,000
		Esselelon IV gol IV	600,000
		Esselelon IV gol III	590,000
		PNS Non Struktural Gol IV	560,000
		PNS Non Struktural Gol III	550,000
		PNS Non Struktural Gol II	460,000
		PNS Non Struktural Gol I	450,000
	20. Kalimantan Tengah	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
		Esselelon II.a	975,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
		Esselelon III gol IV	750,000
		Esselelon III gol III	650,000
		Esselelon IV gol IV	600,000
		Esselelon IV gol III	590,000
		PNS Non Struktural Gol IV	560,000
		PNS Non Struktural Gol III	550,000
		PNS Non Struktural Gol II	460,000
		PNS Non Struktural Gol I	450,000
	21. Kalimantan Timur	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
		Esselelon II.a	975,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
		Esselelon III gol IV	750,000
		Esselelon III gol III	650,000
		Esselelon IV gol IV	600,000
		Esselelon IV gol III	590,000
		PNS Non Struktural Gol IV	560,000
		PNS Non Struktural Gol III	550,000
		PNS Non Struktural Gol II	460,000
		PNS Non Struktural Gol I	450,000
	22. Kalimantan Selatan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
		Esselelon II.a	975,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
		Esselelon III gol IV	750,000
		Esselelon III gol III	650,000
		Esselelon IV gol IV	600,000
		Esselelon IV gol III	590,000
		PNS Non Struktural Gol IV	560,000
		PNS Non Struktural Gol III	550,000
		PNS Non Struktural Gol II	460,000
		PNS Non Struktural Gol I	450,000
	23. Sulawesi Selatan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
		Esselelon II.a	975,000
		Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
		Esselelon III gol IV	750,000
		Esselelon III gol III	650,000
		Esselelon IV gol IV	600,000
		Esselelon IV gol III	590,000
		PNS Non Struktural Gol IV	560,000
		PNS Non Struktural Gol III	550,000
		PNS Non Struktural Gol II	460,000
		PNS Non Struktural Gol I	450,000

2	3	4
24. Sulawesi Utara	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
	Esselon II.a	975,000
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
	Esselon III gol IV	750,000
	Esselon III gol III	650,000
	Esselon IV gol IV	600,000
	Esselon IV gol III	590,000
	PNS Non Struktural Gol IV	560,000
	PNS Non Struktural Gol III	550,000
	PNS Non Struktural Gol II	460,000
	PNS Non Struktural Gol I	450,000
25. Sulawesi Tenggara	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
	Esselon II.a	975,000
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
	Esselon III gol IV	750,000
	Esselon III gol III	650,000
	Esselon IV gol IV	600,000
	Esselon IV gol III	590,000
	PNS Non Struktural Gol IV	560,000
	PNS Non Struktural Gol III	550,000
	PNS Non Struktural Gol II	460,000
	PNS Non Struktural Gol I	450,000
26. Sulawesi Tengah	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
	Esselon II.a	975,000
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
	Esselon III gol IV	750,000
	Esselon III gol III	650,000
	Esselon IV gol IV	600,000
	Esselon IV gol III	590,000
	PNS Non Struktural Gol IV	560,000
	PNS Non Struktural Gol III	550,000
	PNS Non Struktural Gol II	460,000
	PNS Non Struktural Gol I	450,000
27. Gorontalo	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
	Esselon II.a	975,000
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
	Esselon III gol IV	750,000
	Esselon III gol III	650,000
	Esselon IV gol IV	600,000
	Esselon IV gol III	590,000
	PNS Non Struktural Gol IV	560,000
	PNS Non Struktural Gol III	550,000
	PNS Non Struktural Gol II	460,000
	PNS Non Struktural Gol I	450,000
28. Sulawesi Barat	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
	Esselon II.a	975,000
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
	Esselon III gol IV	750,000
	Esselon III gol III	650,000
	Esselon IV gol IV	600,000
	Esselon IV gol III	590,000
	PNS Non Struktural Gol IV	560,000
	PNS Non Struktural Gol III	550,000
	PNS Non Struktural Gol II	460,000
	PNS Non Struktural Gol I	450,000

2	3	4
Pangkal Pinang	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	1,300,000
	Eselon II.a	975,000
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
	Eselon III gol IV	750,000
	Eselon III gol III	650,000
	Eselon IV gol IV	600,000
	Eselon IV gol III	590,000
	PNS Non Struktural Gol IV	560,000
	PNS Non Struktural Gol III	550,000
	PNS Non Struktural Gol II	460,000
	PNS Non Struktural Gol I	450,000
	Ambon	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD
Eselon II.a		975,000
Anggota DPRD/Ess. II.b		950,000
Eselon III gol IV		750,000
Eselon III gol III		650,000
Eselon IV gol IV		600,000
Eselon IV gol III		590,000
PNS Non Struktural Gol IV		560,000
PNS Non Struktural Gol III		550,000
PNS Non Struktural Gol II		460,000
PNS Non Struktural Gol I		450,000
Semate		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD
	Eselon II.a	975,000
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
	Eselon III gol IV	750,000
	Eselon III gol III	650,000
	Eselon IV gol IV	600,000
	Eselon IV gol III	590,000
	PNS Non Struktural Gol IV	560,000
	PNS Non Struktural Gol III	550,000
	PNS Non Struktural Gol II	460,000
	PNS Non Struktural Gol I	450,000
	Lak	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD
Eselon II.a		975,000
Anggota DPRD/Ess. II.b		950,000
Eselon III gol IV		750,000
Eselon III gol III		650,000
Eselon IV gol IV		600,000
Eselon IV gol III		590,000
PNS Non Struktural Gol IV		560,000
PNS Non Struktural Gol III		550,000
PNS Non Struktural Gol II		460,000
PNS Non Struktural Gol I		450,000
Yapura		Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD
	Eselon II.a	975,000
	Anggota DPRD/Ess. II.b	950,000
	Eselon III gol IV	750,000
	Eselon III gol III	650,000
	Eselon IV gol IV	600,000
	Eselon IV gol III	590,000
	PNS Non Struktural Gol IV	560,000
	PNS Non Struktural Gol III	550,000
	PNS Non Struktural Gol II	460,000
	PNS Non Struktural Gol I	450,000



Lampiran III : Peraturan Bupati Kuantan Singingi

Nomor : 29 Tahun 2011

Tanggal : 27 Desember 2011

SATUAN UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

No.	Tujuan	Biaya Transportasi (PP)		
		Darat	Udara (Ekonomi)	Udara (Bisnis)
A.	Dalam Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi*)	110,000	-	-
B.	Didalam Wilayah Provinsi Riau			
	1. Ke Kota Pekanbaru	150,000	-	-
	2. Ke Kab. Indragiri Hulu	150,000	-	-
	3. Ke Kab. Indragiri Hilir	250,000	-	-
	4. Ke Kab. Bengkalis	350,000	-	-
	5. Ke Kab. Kampar	250,000	-	-
	6. Ke Kota Dumai	300,000	-	-
	7. Ke Kab. Rokan Hulu	350,000	-	-
	8. Ke Kab. Rokan Hilir	350,000	-	-
	9. Ke Kab. Siak	240,000	-	-
	10. Ke Kab. Pelalawan	200,000	-	-
	11. Ke Kab. Kepulauan Meranti	400,000	-	-
C.	Diluar Wilayah Provinsi Riau			
	1. Kota Batam	-	1,468,000	4,500,000
	2. Tanjung Pinang	-	1,500,000	3,000,000
	3. Kab. Natuna	-	3,388,400	4,888,400
	4. Aceh	1,350,000	3,390,000	6,500,000
	5. Sumatera Utara	800,000	1,866,000	4,000,000
	6. Sumatera Barat	500,000	-	-
	7. Jambi	700,000	4,500,000	7,000,000
	8. Bengkulu	1,300,000	3,500,000	6,000,000
	9. Sumatera Selatan	1,350,000	4,172,000	7,000,000
	10. Lampung	1,350,000	3,210,000	6,060,000
	11. Jakarta	-	2,600,800	5,500,000
	12. Jawa Barat	-	3,460,000	6,100,000
	13. Jawa Tengah	-	3,720,000	7,290,000
	14. Yogyakarta	-	4,172,000	7,500,000
	15. Jawa Timur	-	4,120,000	8,640,000
	16. Bali	-	4,620,000	8,500,000
	17. Nusa Tenggara Barat	-	4,590,000	8,150,000
	18. Nusa Tenggara Timur	-	7,500,000	10,800,000
	19. Kalimantan Barat	-	4,220,000	7,710,000
	20. Kalimantan Tengah	-	4,390,000	8,230,000
	21. Kalimantan Timur	-	5,070,000	10,280,000
	22. Kalimantan Selatan	-	4,390,000	8,460,000
	23. Sulawesi Selatan	-	5,860,000	8,850,000
	24. Sulawesi Utara	-	7,300,000	13,140,000
	24. Sulawesi Tenggara	-	6,198,000	10,490,000
	26. Sulawesi Tengah	-	6,500,000	8,500,000
	27. Gorontalo	-	6,600,000	8,750,000
	28. Sulawesi Barat	-	5,500,000	8,850,000
	29. Pangkal Pinang	-	3,680,000	6,910,000
	30. Ambon	-	8,500,000	14,500,000
	31. Ternate	-	7,500,000	11,350,000
	32. Biak	-	8,210,000	15,880,000
	33. Jayapura	-	5,800,000	15,800,000



Tanggal : 27 Desember 2011

**JAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN
ERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Tujuan	Biaya Taksi (Rp)
Dalam Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi*)	-
Didalam Wilayah Provinsi Riau	
1. Ke Kota Pekanbaru	-
2. Ke Kab. Indragiri Hulu	-
3. Ke Kab. Indragiri Hilir	-
4. Ke Kab. Bengkalis	-
5. Ke Kab. Kampar	-
6. Ke Kota Dumai	-
7. Ke Kab. Rokan Hulu	-
8. Ke Kab. Rokan Hilir	-
9. Ke Kab. Siak	-
10. Ke Kab. Pelalawan	-
11. Ke Kab. Kepulauan Meranti	-
Diluar Wilayah Provinsi Riau	
1. Kota Batam	300,000
2. Tanjung Pinang	300,000
3. Kab. Natuna	300,000
4. Aceh	300,000
5. Sumatera Utara	300,000
6. Sumatera Barat	-
7. Jambi	-
8. Bengkulu	300,000
9. Sumatera Selatan	300,000
10. Lampung	300,000
11. Jakarta	300,000
12. Jawa Barat	300,000
13. Jawa Tengah	300,000
14. Yogyakarta	300,000
15. Jawa Timur	300,000
16. Bali	300,000
17. Nusa Tenggara Barat	300,000
18. Nusa Tenggara Timur	300,000
19. Kalimantan Barat	300,000
20. Kalimantan Tengah	300,000
21. Kalimantan Timur	300,000
22. Kalimantan Selatan	300,000
23. Sulawesi Selatan	300,000
24. Sulawesi Utara	300,000
24. Sulawesi Tenggara	300,000
26. Sulawesi Tengah	300,000
27. Gorontalo	300,000
28. Sulawesi Barat	300,000
29. Pangkal Pinang	300,000
30. Ambon	300,000
31. Ternate	300,000
32. Biak	300,000
33. Jayapura	300,000



in
ri
ah
lu
un
an
eri
an
en
en
an
31,
ara
ara
ara
ara
rah
ran

Lampiran V : Peraturan Bupati Kuantan Singingi

Nomor : 29 Tahun 2011

Tanggal : 27 Desember 2011

UANG MUKA/PANJAR PERJALANAN DINAS

SPPD No:

Tanggal:

Tujuan Perjalanan Dinas:

No	Uraian	Jumlah
1.	Uang Harian selama Hari	Rp
2.	Uang Penginapan..... Malam	Rp
3.	Perkiraan biaya transport ke..... PP	Rp
4.	Biaya Taksi	Rp
	Uang muka diserahkan.....	Rp

Teluk Kuantan,

Bendahara

Yang Menerima

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

